

**PERANAN PT. YUKO TESA MIRAI SEBAGAI LEMBAGA
PENYELENGGARA PEMAGANGAN KE JEPANG
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH
DATAR (DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA-JEPANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AMBAR SARI OKTY
05 140 156

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg : 3036 / PK VII / 03 / 2010

**ROLE OF YUKO TESA MIRAI COMPANY AS INSTITUTION
ORGANIZATION OFFICIAL TO JAPAN TOWARD LOCAL
GOVERNMENT OF TANAH DATAR INTO THE REALIZE OF
INDONESIA-JAPAN RELATIONSHIP
(Ambar Sari Okty, 05140156, International Law, 70 pages, 2010)**

ABSTRACT

One country will do cooperation with another country and in the relation has been problems. This cooperation has background in politic, social, culture, defence and security and also organization of trainee in foreign country. Organization of trainee in foreign country regulated in article 23 "The Universal Declaration of Human Right". Based on this article, It can be realized by institution of work training, namely : Yuko Tesa Mirai company that is organized of official to Japan. In organize of official to Japan, Yuko Tesa Mirai company cooperate with local government of Tanah Datar as part of Indonesian country. Besides it has common implication, organization official in Japan also has beneficial for local government of Tanah Datar. In this thesis, the writer formulate the problem there is how the Yuko Tesa Mirai company roles as institution organization official to Japan toward local government of Tanah Datar realize of Indonesian-Japan relationship and what is the problem of Yuko Tesa Mirai and local government of Tanah Datar in realization of Indonesia-Japan relationship. This thesis aims to add literature treasury in law field especially has relation with institution organization official in foreign country. Methode of this research is observate, about the role of Yuko Tesa Mirai company as institution organization official to Japan toward local government of Tanah Datar into realize Indonesian-Japan relationship. This research conclude that the role of Yuko Tesa Mirai company toward local government of Tanah Datar, increase of productive energy of worker and reduce jobless amount and increase economics society Tanah Datar regent house as part of Indonesian country. Besides that, the problem in organization of official in Japan most of them derived from official members or clerk is who does not obey in contract like runaway from official program so that they become illegal migrant in Japan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain, karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Bentuk konkrit dari hubungan dan kerjasama ini terdapat dalam hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah suatu negara. Hubungan dan kerja sama yang terjadi dapat bersifat bilateral atau multilateral. Hubungan bersifat bilateral yaitu hubungan yang menyangkut dua negara misalnya antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Jepang, dan lain sebagainya, sedangkan hubungan bersifat multilateral merupakan hubungan dan kerja sama yang mencakup banyak negara dalam satu tujuan tertentu. Selain itu, hubungan yang bersifat regional merupakan hubungan dan kerja sama dalam satu kawasan, misalnya ASEAN.

Hubungan dan kerjasama antar negara tersebut dapat juga disebabkan karena terbatasnya kemampuan suatu negara dalam menguasai keterampilan atau keahlian tertentu seperti di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal inilah yang dialami Indonesia sebagai negara yang berkembang. Di Indonesia teknologi yang digunakan belum secanggih negara-negara maju seperti Jepang. Permasalahan lainnya adalah banyaknya tenaga kerja dan ketidak cukupan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia yang

mengakibatkan terus meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan dari tahun ke tahun. Dalam kondisi yang demikian, alternatif yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah adalah menempatkan tenaga kerja tersebut ke luar negeri yang biasanya dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disebutkan pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹

Selain melalui penempatan TKI ke luar negeri, alternatif lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui program penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia. Pemagangan di luar negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.²

Penempatan TKI dan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri merupakan jembatan penghubung adanya kerja sama negara Indonesia dengan negara lain atas keterampilan atau keahlian tertentu. Didalamnya tercakup Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja dan pemagang, dan negara

¹ Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

² Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa poin penting diantaranya:

1. PT. Yuko Tesa Mirai yang merupakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang bergerak di bidang penyelenggaraan magang ke Jepang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap Pemda Kabupaten Tanah Datar. Hal ini terkait juga dengan Konvensi Internasional yaitu "The Universal Declaration of Human Right" pasal 23 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, memilih pekerjaan, menikmati kondisi kerja yang baik serta perlindungan atas ancaman pengangguran. Selain berfungsi terhadap peningkatan devisa negara, mengurangi dan menurunkan jumlah pengangguran sebagai implikasi dari hak untuk bekerja, penyelenggaraan magang ke Jepang juga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat melalui peningkatan tenaga kerja produktif dalam bidang pertanian dan peternakan bagi masyarakat
2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Yuko Tesa Mirai di lapangan antara lain peserta pemagangan melarikan diri dan meninggalkan program pemagangan. Konsekuensi yang diterima oleh peserta yang melarikan diri adalah bahwa peserta yang bersangkutan telah kehilangan semua hak dan fasilitas sebagai peserta program pemagang dan statusnya berubah dari peserta pelatihan program pemagangan ke Jepang menjadi pendatang

Daftar Pustaka

A. Buku

- A.Siti Sutami. *Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Karunika Universitas Terbuka. 1985.
- Abdussalim. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*. Jakarta : Restu Agung. 2009.
- Badan Pusat Statistik. *Tanah Datar Dalam Angka*. 2007-2009.
- Bayu Seto. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2006
- Bambang Soegono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 1997.
- C.S.T Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara. 1993
- C.S.T Kansil, Christine ST Kansil. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008
- Djasadin Saragih. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Alumni. Bandung. 1974.
- Hartono Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung : Bina Cipta. 1982
- Hilman. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas. 1989.
- Huala Adolf. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta : PT. RajaGrafindno Persada. Hal. 81-82.
- J. Frankel. *Hubungan Internasional*. Jakarta : Bumi Aksara. 1991
- Juanda Wawan. *Politik Internasional : Suatu Kerangka Analitis*. Bandung : Bina Cipta. 1997.
- Mochtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional*. Jakarta :LP3ES. 1990.